ISSN: 2746-3265 (Online)
Volume 2 Issue 3 December 2021
Published by Mahesa Research Center
Kontestasi Politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur, 1800-1865

Fachri Syauqii*, Nabila Yasmin & Jufri Naldo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the political contestation between the Deli and Serdang Sultanates and to determine the impact of the contestation. This study uses the historical method with four steps, namely: heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources of data used in this study include primary and secondary sources. Primary sources are agreement texts and interviews. While secondary sources are obtained through several books, theses, and journals related to the two sultanates. The analysis used is deductive, namely drawing conclusions from the general to the specific, in which the political contestation in the Deli and Serdang Sultanates, so as to obtain information on how the political contestation between the two.

ARTICLE HISTORY

Submitted 18 December 2021
Revised 12 January 2022
Accepted 18 January 2022

KEYWORDS

East Sumatra; Deli Sultanate; Serdang Sultanate; political contestation.

CITATION (APA 6th Edition)

Syauqii, F., Yasmin, N., & Naldo, J. (2021). Kontestasi Politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur, 1800-1865. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*. 2(3), 90-96

*CORRESPONDANCE AUTHOR

fachrisyauqii770@gmail.com

PENDAHULUAN

Wilayah Sumatera Timur terdapat beberapa kesultanan, yaitu Deli dan Serdang. Selain itu, ada beberapa Kesultanan lainnya, seperti Langkat, Asahan dan Kota Pinang. Juga terdapat beberapa kedatukan kecil, seperti Kedatukan Sunggal, Denai, Perbaungan, Bedagai, dan sebagainya. Beberapa dari kedatukan kecil ini nantinya masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Deli atau Serdang. Menurut Sinar dalam bukunya yang berjudul "*Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*" bahwa beberapa kedatukan kecil yang berada di bawah Kesultanan Serdang seperti Kedatukan Perbaungan, Araskabu, Tanjong Morawa dan Kampong Baru serta Negeri Denai. Sementara kedatukan kecil yang berada di bawah Kesultanan Deli adalah Kedatukan Sunggal, Serbanyaman, Serbajadi, Bedagai (Sinar T. L., 2006, p. 87).

Munculnya Kesultanan Deli disebabkan Gocah Pahlawan mendapat fitnah dari Kerajaan Aceh bahwa istrinya melakukan perbuatan jahat dengan putra raja Aceh. Maka, dari sini ia dan beberapa pengikutnya meninggalkan Aceh ke wilayah yang telah dikuasainya dengan mendirikan Kerajaan baru bernama Deli. (Sinar L. , 1971, p. 35). Kerajaan Deli telah resmi lepas dari pengaruh Aceh dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1669 M. Nama resmi kerajaan ini adalah *Kerajaan Al-Mu'tasim Billah Deli*. Wilayah Deli mencakup kota Medan saat ini, Langkat, Suka Piring, Buluh Cina, serta beberapa negara kecil lainnya di sekitar pesisir Timur Sumatera. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat dan maju di kawasan Selat Malaka (Takari, 2012, p. 70).

Menurut Sinar dalam buku yang berjudul *Sari Sejarah Serdang I*, berdirinya Kesultanan Serdang akibat konflik yang terjadi dalam kubu Kesultanan Deli sehingga mengakibatkan pecahnya kekuasaan pada tahun 1723 M. Untuk menghindari terjadinya perang saudara, maka dua orang besar dari Deli, yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah disertai dengan Raja Urung Batak Timur dan seorang pembesar dari Aceh mengangkat Tuanku Umar Johan Alamsyah sebagai Sultan Serdang yang pertama (Sinar T. L., 2006, p. 55). Ia merupakan putra dari Kesultanan Deli yang ke III bernama Tuanku Panglima Paderap. Ia kemudian berpindah dan meletakkan pusat kekuasaannya di Kampung Besar (Serdang) (Batubara, 2019, p. 86).

Perebutan wilayah Sumatera Timur kian menarik kala Eropa menunjukkan perhatiannya terhadap potensi sumber daya alam dan perdagangan. Di antaranya Inggris dan Belanda saling berebut pengaruh dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi di pesisir Timur Sumatera. Keduanya menggunakan politik *devide et impera* (politik adu domba)

© 2021 The Author(s). Published by Mahesa Research Center
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (http://creativecommons.org/license/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

sehingga antara Kesultanan Deli Serdang saling berkonflik. Maka, potensi sumber daya alam di Sumatera Timur direbut dan dimanfaatkan oleh Inggris dan Belanda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode adalah suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Metode itu bersifat lebih praktis karena memberikan petunjuk mengenai cara, prosedur, atau teknik pelaksanaannya secara sistematik. Sementara, metode sejarah didefinisikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematik sesuai dengan aturan-aturan ilmu sejarah (Daliman., 2012, p. 27). Metode penulisan sejarah memiliki beberapa tahapan, yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahapan heuristik, penulis mencari buku di Taman Baca Luckman Sinar dan Perpustakaan Negeri Sumatera Utara. Tahapan selanjutnya, penulis mencoba memverifikasi dengan menganalisis sumber yang telah didapatkan. Kemudian, tahapan interpretasi yaitu dengan menyambungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya sehingga mendapatkan peristiwa sejarah yang mendekati kebenaran. Terakhir tahapan historiografi, penulis menuliskan sejarah sebagai kisah secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Politik-Pemerintahan Kesultanan Deli dan Serdang

Menurut Reid (2012), kesultanan-kesultanan Melayu yang ada di Sumatera mengambil bentuk dari kerajaan-kerajaan besar Islam pada abad ke-16 M dan ke-17 M. Aturan dan hukum yang dijalankan oleh pihak kesultanan adalah kesetiaan mutlak pada raja yang dibebankan kepada rakyat, jika tidak dipatuhi atau durhaka maka pembalasan Tuhan pasti akan turun. Namun, hanya sebagian sultan Melayu yang memperhatikan urusan pemerintahan sehari-hari. Kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur mengambil bentuk dari campuran berbagai etnik, seperti unsur Batak, Minangkabau, Aceh dan India daripada dari Malaka dan Johor. Hal ini juga bisa dilihat pada Kesultanan Deli dan Serdang.

Dalam *Hikayat Deli*, Kesultanan Deli berada di bawah Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ia mengirim utusan yang merupakan seorang panglima besar dalam strategi penaklukan perang Aceh bernama Muhammad Dalik atau Gocah Pahlawan ke wilayah Percut (sekarang wilayahnya berada di pesisir dekat Medan). Beberapa tahun kemudian ia mulai menetap di Gunungkelaus (di hulu Deli Tua) (Perret, 2010, p. 130).

Saat Gocah Pahlawan dilantik, ia mengucapkan salah satu sumpah yaitu ‘memperkuat agama dan dakwah Islam serta memperluas dalam segala bidang yang berpedoman kepada: Aceh Serambi Mekah, Deli serambi Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda meninggal, Aceh dilanda krisis kepemimpinan dan kemunduran karena tampuk kesultanan dilanjutkan oleh wanita. Kesultanan Deli menganggap bahwa seorang pemimpin harus laki-laki, karena hal ini berlandaskan ajaran Islam.

Oleh karena itu Deli mulai melepaskan diri dari pengaruh Aceh, namun Aceh mengirim beberapa armadanya untuk meminta ketegasan Gocah Pahlawan. Deli tidak bisa berbuat banyak selain mengikrarkan kembali kesetiaannya. Pada masa Tuanku Panglima Perunggit, Deli berusaha memerdekakan diri dari Aceh, tetapi usaha itu tidak berhasil sepenuhnya, maka ditetapkan bahwa Deli merupakan kerajaan yang berotonomi penuh namun masih di bawah perlindungan Aceh (Pelly & dkk, 2019, p. 482).

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kesultanan yang ada di Sumatera Timur membagi dalam dua kawasan kultural yaitu wilayah melayu pesisir dan wilayah pedalaman/pegunungan yang dihuni oleh etnis Karo/Batak. Sultan didampingi oleh para pembesarnya yaitu para Orang Besar. Posisi Dewan Kerajaan diisi oleh Dewan Menteri dan Wakil Sultan/Raja Muda yang dipimpin oleh Sultan. Kemudian posisi Orang Besar yang diberi gelar Tumenggung, terbagi dalam jaksa/kepala polisi yang bertugas mendirikan penjara dan menangkap penjahat, syahbandar yang bertugas mengutip bea cukai di pelabuhan dan urusan administrasi dengan pihak luar, laksamana sebagai panglima angkatan laut, panglima darat sebagai panglima angkatan darat, mufti/imam paduka tuan sebagai pengurus masalah agama (Pelly & dkk, 2019, p. 492).

Ada perbedaan Orang Besar pada Kesultanan Deli dan Serdang, pada Kesultanan Deli terdapat Datuk 4 Suku sedangkan Serdang terdapat Wazir Berempat. Menurut sejarahnya, Datuk 4 Suku berawal ketika Gocah Pahlawan menjadi penguasa Deli yang masih berada di bawah pengaruh Aceh, ia menikah dengan adik Raja Sunggal bernama Puteri Nang Baluan tahun 1632 M. Perkawinan ini mengakibatkan ia diakui oleh raja-raja Batak seperti, Sunggal, XII Kuta Hamparan Perak dan Sukapiring sebagai hakim perdamaian (Sangti, 1997). Berikut struktur Pemerintahan di Kesultanan Deli dan Serdang.
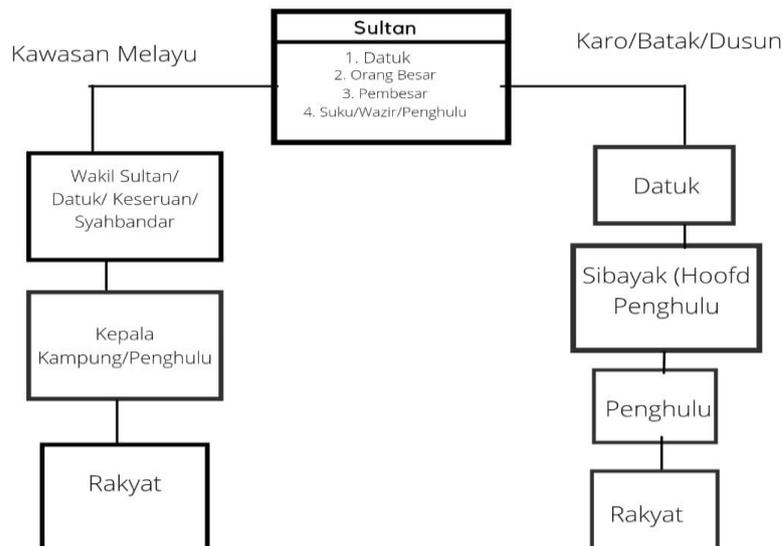
Gambar 1. Struktur Pemerintahan Kesultanan Deli dan Serdang
Sumber: Buku *Tak Hilang Melayu di Bumi*

Perpecahan Antara Kesultanan Deli dan Serdang

Tuanku Panglima Paderap memerintah dari tahun 1698 M dan wafat pada tahun 1728 M. Maka sebelum wafat, terjadi proses pemilihan dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi Sultan Deli selanjutnya. Pendapat ini didukung Dalam menentukan pengganti sultan, Deli memiliki sistem pemilihan melalui 4 Raja Urung atau yang disebut dengan "Datuk Empat Suku", mereka adalah Raja Urung Sunggal, Raja Urung XII Kuta (Hamparan Perak), Raja Urung Senembah, dan Raja Urung Suka Piring.

> "Konflik internal yang terjadi di Kesultanan Deli kemudian melahirkan Kesultanan Serdang, karena keempat putra Tuanku panglima Paderap memiliki keinginan untuk berkuasa. Maka, terjadi perebutan kekuasaan antara mereka hingga melahirkan Kesultanan Serdang. Lalu ketika Serdang mulai memisahkan diri dengan Deli, pertikaian antara kedua kesultanan ini terus berlanjut dengan beberapa poin penting yang perlu dicatat, yaitu perebutan suksesi, perluasan wilayah yang bertujuan untuk mendapat dukungan, sumber daya alam, dan perdagangan dengan tujuan ekonomi. Wilayah pesisir menjadi pusat aktivitas perdagangan dengan pihak luar dan komoditas yang paling menarik perhatian adalah lada" (wawancara dengan Suprayitno, 20 September 2021).

Diantara keempat putra Tuanku Panglima Paderap, adalah:

1. Tuanku Jalaludin, yang memiliki gelar Kejuruan Metar. Beliau merupakan keturunan dari bangsawan Mabar, Percut dan Tanjung Mulia.
2. Tuanku Sutan Panglima Gandar Wahid, yang memiliki gelar Panglima Pasutan. Ia merupakan keturunan dari bangsawan Deli dan Bedagai.
3. Tuanku Wahidin yang memiliki nama lain yaitu Tuanku Tawar, yang memiliki gelar Kejuruan Santun. Ia merupakan keturunan dari bangsawan Denai dan Serbajadi.
4. Tuanku Umar, yang memiliki gelar Kejuruan Junjungan (Arifin, 1987).

Tuanku Jalaludin merupakan anak tertua dari Tuanku Panglima Paderap, namun ia memiliki cacat jasmani sehingga tidak termasuk dalam calon pengganti. Sedangkan Panglima Pasutan merupakan anak kedua yang berhasrat mengambil alih kekuasaan. Namun menurut tradisi adat raja-raja melayu, penerus raja yang telah wafat harus seorang putra yang diambil dari permaisuri (putera Gahara). Maka, Tuanku Umar merupakan anak dari Puan Sampali yang merupakan permaisuri dari Percut (Basarshah II, Sinar, Sinar, & Umry, 2007). Sebaliknya menurut silsilah garis keturunan (tarombo) dari Serdang, Tuanku Panglima Pasutan tidak termasuk putra dari permaisuri/gahara (Sinar L. , 1971, p. 39).

Pada pihak Mabar dan Percut tidak setuju dan sangat keberatan Panglima Pasutan menjadi Raja Deli. Tuanku Jalaluddin sebagai anak tertua juga menginginkan posisi menjadi Raja Deli menggantikan ayahnya(Arifin, 1987). Menurut adat karo, pengganti raja harus dari putera Gahara walaupun masih dibawah umur tapi tetap sah. Namun,

Datuk Urung XII Kuta dan Datuk Urung Sukapiring lebih berpihak kepada Panglima Pasutan. Maka, secara sah yang menjadi Sultan Deli ke-IV adalah Tuanku Panglima Pasutan pada tahun 1728 M. Kemudian, Tuanku Umar dan ibunya diusir ke daerah Serdang. Untuk menghindari terjadinya perang saudara maka Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Tanjung Merawa, beserta utusan dari Sultan Aceh yaitu Kejuruan Lumu mengangkat dan menobatkan Tuanku Umar sebagai Raja Negeri Serdang yang pertama dengan pusat pemerintahan di muara sungai Serdang (Belumai) pada tahun 1723 M (Basarshah II, Sinar, Sinar, & Umry, 2007).

> "Mengapa Datuk Urung XII Kuta dan Datuk Sukapiring memihak kepada Tuanku Panglima Pasutan dari Kesultanan Deli daripada Tuanku Umar dari pihak Kesultanan Serdang? bahwa lahan Datuk Hamparan Perak dan Datuk Sukapiring berada di tengah Kota Medan. Keduanya memprakarsai perpindahan ibu kota Deli dari Pulo Brayan ke Labuhan Deli. Oleh karena itu, Tuanku Panglima Pasutan memanfaatkan keberpihakan dari kedua kedatukan ini untuk kepentingan Kesutanan Deli" (wawancara dengan Tengku Mira 13 September 2021).
>
> "Terjadinya perebutan mengenai siapa yang layak menjadi Sultan Deli ke-IV menggantikan Tuanku Panglima Paderap, mengerucut antara Tuanku Panglima Pasutan dengan Tuanku Umar. Maka, Datuk Empat Suku sama sekali tidak berpihak kepada keduanya. Apabila pihak kedatukan memihak, maka akan menjatuhkan eksistensi mereka. Oleh karena itu, dibentuk musyawarah dalam menentukan yang menghasilkan pengganti Tuanku Panglima Paderap sebagai pengganti ayahanda Tuanku Panglima Pasutan menjadi Sultan Deli ke-IV. Sementara, saudara-saudaranya diberikan hak kepemimpinan di beberapa wilayah. Namun Tuanku Umar merasa layak untuk menggantikan ayahandanya, maka beliau berlepas diri dari Kesultanan Deli" (wawancara dengan Tengku Moharsyah 17 September 2021).

Ketika Kesultanan Serdang telah berdiri dan berdaulat, maka posisi sultan memiliki beberapa peran penting, seperti menjadi *ulil amri*, sebagai kepala Adat Melayu, dan sebagai Pemerintahan Kerajaan Serdang. Beberapa daerah juga mulai tunduk kepada Kesultanan Serdang, seperti Denai (Sinar T. L., 2006, p. 55). Menurut Ichwan Azhari, masa Tuanku Umar sebagai Sultan Serdang yang pertama keadaan pemerintahannya belum stabil karena masih dilanda konflik (Azhari, 2013, p. 36). Meskipun Kesultanan Serdang telah memisahkan diri dari Deli, dengan tujuan untuk menghindari perang saudara, namun pertikaian antara kedua kesultanan ini tetap berlanjut.

Pengaruh Aceh, Siak, dan Intervensi Pihak Asing di Kesultanan Deli dan Serdang

Menurut *Hikayat Deli,* pengaruh Aceh sangat kuat pada Kesultanan Deli yang ditandai dengan pemberian gelar "Panglima" kepada pemimpin-pemimpin Kesultanan Deli (Perret, 2010, p. 130). Namun pengaruh Aceh di beberapa Kesultanan Sumatera Timur, khususnya Deli, mulai lemah. Ini dikarenakan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda tidak ada seorang pengganti seperti dirinya dalam mempertahankan kebesaran Aceh. Kemudian, Aceh mengalami kemunduran ketika secara berturut-turut dipimpin oleh pemimpin wanita selama 59 tahun. Akibatnya pada tahun 1669 M, menurut Husny, Kesultanan Deli di masa kepemimpinan Tuanku Panglima Perunggit memerdekakan diri dari Aceh (Pelly, R, & Alfian, 1986, p. 76). Padahal, sebenarnya Aceh hanya memberikan otoritas penuh kepada Kesultanan Deli (Pelly & dkk, 2019).

Momentum ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Siak Sri Inderapura untuk merebut pengaruh di Kesultanan Melayu Sumatera Timur. Menurut Perret, sekitar abad ke-17, terjadi situasi yang tidak menentu di Sumatera Timur. Hal ini diakibatkan oleh perebutan pengaruh kedaulatan antara Aceh dan Siak. Tetapi, para pemimpin di Kesultanan Sumatera Timur, khususnya Deli dan Serdang lebih memilih jalan tengah, sehingga memunculkan sebuah istilah "beraja ke Aceh, bertuan ke Siak". Kesetiaan ini ditandai dengan pemberian upeti kepada kedua kerajaan tersebut (Perret, 2010, p. 131).

> Deli pada masa pemerintahan Sultan Panglima Mangedar Alam memilih untuk berdiplomasi kepada Kerajaan Siak dikarenakan ada keuntungan politik. Selain itu, alasan lainnya adalah karena menurut hukum kanun yang telah disusun oleh Tuanku Gocah Pahlawan, sebagai pendiri dari Kesultanan Deli, seorang pemimpin itu harus laki-laki. Kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultanah-Sultanah, maka Kesultanan Deli menolak untuk menyembah kepada pemimpin perempuan. Namun, tetap mempertahankan hubungannya. Oleh karena itu, Kesultanan Deli lebih memilih untuk dipertuan oleh Siak karena dipimpin oleh seorang pemimpin laki-laki. Maka, muncullah sebutan "Beraja ke Aceh, Bertuan ke Siak" (wawancara dengan Tengku Moharsyah pada 17 September 2021).

Tahun 1853, Kerajaan Aceh kembali menguasai wilayah Pantai Timur di bawah kepemimpinan Tuanku Ibrahim dengan utusannya Pangeran Husin. Ia mengirim sebuah armada besar yang berjumlah dua ratus perahu Aceh. Alhasil, Pangeran Husin memaksa penguasa Langkat, Deli, dan Serdang menerima kekuasaan Ibrahim dengan menggunakan

stempel baru yang bertuliskan "wakil Sultan Aceh (gelar ini juga memiliki arti *pahlawan, wakil,* dan *wazir*) (Reid, 2007, p. 17).

Namun pada tahun 1854, Kerajaan Siak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ismail. Ia meminta bantuan kepada Gubernur Inggris yang ada di Singapura, yaitu E. A. Blundell, namun sia-sia. Walhasil, ia membuat perjanjian kepada Kerani Kepala kantor dagang di Singapura, bernama Adam Wilson, dengan tujuan mengalahkan Tengku Putra dan mengembalikan kekuasaannya atas wilayah-wilayah bawahannya. Tetapi dengan syarat, yaitu mendapatkan hak-hak istimewa dalam bidang perdagangan dan mendapatkan laba yang berkisar sepertiga dari wilayah yang berhasil direbut kembali.

Tahun-tahun berikutnya, kedua utusan Belanda, yaitu Niewenhuyzen dengan penggantinya sebagai Residen Riau yang baru yaitu bernama J. H. Tobias, mengadakan sebuah perjanjian bersama Sultan Ismail, Tengku Putra, dan empat kepala suku Siak. Perjanjian ini dikenal dengan Traktaat Siak yang dilakukan pada 1 Februari 1858. Pada pasal 2 dari perjanjian ini, menetapkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kedaulatan Siak, di antaranya Asahan, Batubara, Serdang, Deli, Langkat, dan Tamiang (Reid, 2007, pp. 27-31). Pada masa yang akan datang, Belanda memanfaatkan perjanjian ini untuk mengekspansi serta bertujuan untuk menyudahi kebebasan Kesultanan-Kesultanan yang ada Sumatera Timur (Sinar T. L., 2006, p. 184).

Perjanjian ini pun memunculkan perdebatan antara Siak dan Aceh mengenai wilayah Sumatera Timur. Aceh kemudian merespons mengenai maksud dan tujuan Belanda, yaitu agar melemahkan pengaruh Aceh di Sumatera Timur. Maka Sultan Ala'uddin Manshur Shah membuat siasat, yaitu mengirim beberapa utusan untuk menyelidiki sejauh mana kesetiaan kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur kepada Aceh.

Landschap Serdang

ACTE VAN ERKENNING.

Aangezien het den resident van Riouw en onderhoorigheden gebleken is, dat in de regering van het landschap Serdang en onderhoorigheden, Pertjoet, Danai, Pabaoengan, Bedagaij en Padang, behoorende tot het Rijk Siak Srie Indrapoera en onderhoorigheden, wettig is opgetreden als radja onder den naam van sultan Basjar Oedin, en als zoodanig behoort te worden erkend; en aangezien door hem op heden in handen van den resident voornoemd de aan deze acte gehechte verklaring is afgelegd en beëedigd.

Zoo is het, dat de resident voornoemd heeft goedgevonden, als gevolmagtigde van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, dat de opperheerschappij uitoefent over het Rijk van Siak Srie Indrapoera, voornoemden sultan Basjar Oedin in zijnen rang als radja over het landschap Serdang en onderhoorigheden te erkennen, gelijk geschiedt bij deze.

Ten blijke waarvan deze acte is opgemaakt en onderteekend door den resident van Riouw en onderhoorigheden op heden, den 16den Augustus 1862.

(*get.*) E. NETSCHER.

VERKLARING.

Ik ondergeteekende, sultan Basjar Oedin, beloof plegtiglijk:

Art. 1. Den sultan van Siak Srie Indrapoera te erkennen als mijn vorst onder de souvereiniteit van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, als souverein over het Rijk Siak Srie Indrapoera.

Art. 2. De rust en vrede in mijn Rijk en met mijne naburen te handhaven.

Art. 3. Den handel en landbouw te beschermen en te bevorderen.

Art. 4. Den handel in slaven met alle magt tegen te gaan.

Art. 5. Aan onderdanen van het Gouvernement, die zich aan misdrijf hebben schuldig gemaakt, geene schuilplaats te verleenen.

Art. 6. Van vreemde mogendheden of vorsten of van derzelver vertegenwoordigers of agenten geene brieven, geschenken aan te nemen of zendelingen te ontvangen, zonder voorkennis of toestemming van den resident van Riouw en onderhoorigheden.

Art. 7. Niet toe te laten, dat Europeanen zich zonder voorkennis en toestemming binnen mijn Rijk vestigen.

Hebbende ik deze verklaring met eede bevestigd, en ten blijke daarvan deze acte onderteekend op heden, den 16den Augustus 1862.

In onze tegenwoordigheid.

(*get.*) E. NETSCHER.

Resident van Riouw en onderhoorigheden,

(*get.*) H. A. MODDERMAN,

Kapitein-luitenant ter zee Stations-kommandant in de wateren van Riouw en Lingga,

(*get.*) M. J. A. ARNOLD,

Adsistent-resident van Siak Srie Indrapoera,

Voor eensluidende afschriften,

De Gouvernements-Secretaris,

(*get.*) VAN DEINSE.

Gambar 2. Arsip *Acte van Erkenning* antara Residen Netscher dan Kesultanan Serdang

Sumber: Koleksi Pribadi Perpustakaan Tengku Luckman Sinar

Bentuk Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang

Ada beberapa bentuk yang ditimbulkan dari kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang. Di antaranya adalah dari sisi sistem pemerintahan, wilayah dan ekonomi. Jika dilihat dari segi politik, antara Kesultanan Deli dan Serdang memiliki kedaulatannya sendiri. Dalam sistem pemerintahan, dampak yang dirasakan adalah Keduanya sama-sama berdaulat dan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. sementara itu, salah satu kebijakan politik kedua kesultanan mencoba untuk menanamkan pengaruhnya pada penguasa setempat, seperti Sultan Deli yang memperkuat posisi Datuk Empat Suku sebagai penasihat, tetapi Sultan Serdang setelah berdaulat sendiri membentuk Wazir Berempat sebagai

penasihat sultan. Namun, Datuk Sunggal memiliki posisi yang istimewa di antara kedatukan lainnya, yaitu tidak pernah tergantikan dalam proses penobatan sultan selanjutnya sebagai pembaca Ulon Janji.

Pada Kesultanan Serdang, wazir berempat itu adalah: (1) Kepala Distrik Kampung Besar yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Araskabu dengan gelar *datuk paduka mahamentri*, (2) Kepala Distrik Ramunia yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Kampung Durian dan Denai dengan gelar *maharaja*, (3) Kepala Distrik Kampung Baru yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Batangkuis dengan gelar *datuk paduka raja*, (4) Kepala Distrik Lubuk Pakam yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Lubuk Pakam dengan gelar *bendahara* (Pelly, R, & Alfian, 1986, p. 22).

Isi kedua dari perjanjian ini, mengarah kepada segi ekonomi yang menjelaskan gambaran bahwa Labuhan Deli merupakan pelabuhan strategis. Sehingga kedua kesultanan ini memiliki minat untuk mengambil keuntungan dari pemakaian pelabuhan demi kemajuan ekonomi (Pelly, R, & Alfian, 1986, p. 72). Salah satu komoditas yang menarik para pedagang asing adalah lada yang di ekspor ke Penang dan Malaka (Sinar L. , 1971, p. 81). Tahun 1822 M, laporan Inggris mencatat jumlah ekspor lada pihak Kesultanan Deli sekitar 26.000 ton dan Serdang sekitar 8.000 ton. Dalam catatan John Anderson tahun 1823 M, ia mengasumsikan bahwa kegiatan ekspor di Kesultanan Deli dan Serdang sekitar 3.500 ton lada per tahun (Perret, 2010, p. 107).

Gambar 3. Labuhan Deli Tahun 1885
Sumber: *Nationaalarchief.nl*

Tabel 1. perkembangan kegiatan ekonomi di Kesultanan Deli dan Serdang dalam kegiatan ekspor perkebunan (dalam satuan ton)

Komoditas	1862	1863	1864	1865
Lada	415	880	1943	960
Pala	25	4	9	11
Tembakau	25	19	25	40

Sumber: Daniel Perret "Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur"

> "Jika kedua kesultanan ini ingin berkembang pesat, maka harus menguasai wilayah pesisir yang menjadi sektor kegiatan ekonomi. Dampak ekonomi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh Kesultanan Deli dan Serdang. Dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat, membentuk prajurit, membangun istana, dan sebagainya" (wawancara dengan Suprayitno, tanggal 20 September 2021).

Dampak perebutan wilayah juga sangat dirasakan, wilayah Denai masih menjadi perdebatan antara Kesultanan Deli dan Serdang. Menurut Deli, wilayah Denai melingkupi seluruh batang Sungai Ular sampai ke Timbang Langkat. Menurut Serdang, wilayah Denai melingkupi lembah muara Sungai Ular dan Sungai Denai. Oleh karena itu, hal ini menjadi penyebab Kesultanan Serdang menyerang Deli. Tetapi, dengan kehadiran Residen Netscher tahun 1865 M, wilayah Percut dan Denai diserahkan kembali kepada Deli. Wilayah Senembah menjadi urusan Residen Belanda sehingga tidak termasuk wilayah dari kedua kesultanan ini (Pelly, R, & Alfian, 1986, p. 73).

SIMPULAN

Kesultanan Deli dan Serdang saat ini memiliki kedaulatannya masing-masing. Perselisihan antara keduanya sudah mereda. Keduanya menganggap berasal dari darah yang sama, yaitu Gocah Pahlawan. Maka, keduanya menjalin

hubungan, baik dengan tetap menjalin komunikasi maupun melalui pernikahan. Saat ini, sultan hanya dianggap sebagai lembaga adat saja tidak lebih. Namun, di antara keduanya masih ada kecenderungan menganggap kesultanannya lebih baik. Menurut penulis, harusnya tidak lagi memiliki anggapan demikian. Karena hal ini akan menimbulkan pergesekan emosional. Maka, sebaiknya anggapan tersebut dihindari dengan tujuan untuk merajut persaudaraan.

REFERENSI

Arifin, T. M. (1987). *Kisah dan Peristiwa yang Berkaitan Dengan Sejarah Negeri Serdang.* Jakarta: CV Nugraha.

Azhari, I. (2013). *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam Pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah.* Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Basarshah II, L. S., Sinar, S., Sinar, T. S., & Umry, S. H. (2007). *Mahkota Adat dan Budaya Melayu Serdang.* Medan: Kesultanan Serdang.

Batubara, T. (2019). *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang)* . Yogyakarta: Atap Buku.

Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.

Mededeelingen van De Afdeeling Betuurszaken Der Buitengewesten van Het Departement van Binnenlandsch Bestuur Serie A No.3 Overeenkomsten Met De Zelfbesturen In De Buitengewesten. Retrieved from https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB18A:013104000:00043&query=acte+van+erkenning+netscher&coll=boeken&rowid=4

Pelly, U., & dkk. (2019). *Tak Hilang Melayu di Bumi.* Medan: Casa Mesra Publisher.

Pelly, U., R, R., & Alfian, T. I. (1986). *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelzer, K. J. (1985). *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria.* Jakarta: Sinar Harapan.

Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut.* Jakarta: KPG.

Reid, A. (2007). *Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19.* Jakarta: YOI.

Reid, A. (2012). *Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional.* Jakarta: Komunitas Bambu.

Sinar, L. (1971). *Sari Sejarah Serdang Jilid I.* Medan: Balai Pustaka.

Sinar, T. L. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur.* Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.

Sinar, T. L. (1986). *Sari Sejarah Serdang 2.* Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.

Takari, M. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya.* Medan: USU Press.

Sangti, B. (1997). *Sejarah Batak.* Balige: Karl Sianipar Company.